



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2021**

**KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Penggambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	4
2.1 Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar.....	4
2.1.1 Indikator kinerja Kunci Keluaran	4
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	8
2.2. Akuntabilitas.....	10
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	11
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	12
4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	12
4.1.2 Realisasi.....	12
4.1.3 Alokasi Anggaran.....	13
4.1.4 Dukungan Personil	15
4.1.5 Permasalahan dan Solusi.....	16
BAB V PENUTUP	17

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, memiliki Struktur yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
4. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Dan Penindakan
 2. Seksi Pengamanan
5. Bidang Aparatur Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Kesiapsiagaan
 2. Seksi Kedaruratan

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2021



BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan gambaran dari keberhasilan dalam mengatur dan mengurus urusan SKPD yang menjadi kewenangan SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Laporan capaian kinerja urusan SKPD memuat data/informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara lengkap.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang Ditangani	68 Pelanggaran	Satpol PP dan Damkar	
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	490 Terlatih	Satpol PP dan Damkar	
				3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	26	Satpol PP dan Damkar	
				4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 orang	Satpol PP dan Damkar	

				5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedia	Satpol PP dan Damkar	
				6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedia	Satpol PP dan Damkar	
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$1/1 \times 100\% = 100\%$	Satpol PP dan Damkar	
				2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$110/9.913 \times 100\% = 1,11\%$	BPBD	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$1/1 \times 100\% = 100\%$	Satpol PP dan Damkar	
				2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$1/1 \times 100\% = 100\%$	Satpol PP dan Damkar	
				3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Nihil	Satpol PP dan Damkar	
				4	Persentase warga negara yang ikut Pelatihan	Nihil	Satpol PP dan Damkar	
				5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Nihil	Satpol PP dan Damkar	
				6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Nihil	Satpol PP dan Damkar	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 %		
				2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		
				3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
				4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong	100%		

			kebakaran		dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			
		5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	1. 80 Evaluasi dan Penyematan korban terjebak pada objek kebakaran		
				2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedia Terbangunnta : 7 Pos sektor dan Pos induk di 7 Kecamatan 11 Kecamatan terbangunnya pos induk dan pos sektor	Satpol PP dan Damkar	
				3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia Terpenuhi Tugas Jaga pada Pos induk dan Pos sektor selama 1x24 jam	Satpol PP dan Damkar	
				4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Terpenuhi Sebanyak 12 Desa /Kelurahan dari 130 desa /Kelurahan		
				5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya 9 Mobil Operasional Damkar Mesin		

						Portebel 1 buah		
				6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	11 orang		
				7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	120 Relawan	Satpol PP dan Damkar	
				8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	11 Orang	Satpol PP dan Damkar	

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 49 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 49	100%	SatpolPP&Damkar
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan = 55 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 55	100%	Satpol PP & Damkar
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	110 orang	Satpol PP & Damkar BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 orang	Satpol PP & Damkar BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	119 Jiwa	Satpol PP & Damkar BPBD

			dan evakuasi korban bencana				
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ Perangkat Daerah = 81 ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten= 81	100%	Satpol PP & Damkar BPBD	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Satpol PP & Damkar BPBD	

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja menginformasikan capaian keberhasilan Satpol PP dan Damkar dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala SKPD.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak ada Melaksanakan Tugas Pembantuan/ Kegiatan dimaksud”

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SKPD pelaksana SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) terdapat dua SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Tanah Laut

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas meliputi :
 - a. Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Keterangan
1	Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	100%	SatpolPP dan Damkar

4.1.2 Realisasi

Tabel 4.2 Realisasi Pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	115 orang (100%)	115 orang (100%)

4.1.3 Alokasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2021 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) setelah Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 19.1345.719.150 yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.993.067.072,-

Belanja Langsung : Rp. 9.370.497.408,-

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
I	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	528.444.000	479.434.600	90,73

	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	151.665.000	148.647.100	98,01
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	376.779.000	330.787.500	87,79
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.754.320.186	9.255.558.186	94,89
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.320.097.090	1.195.943.000	90,60
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	520.342.500	387.850.000	77,21
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.461.600	45.573.850	58,08
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.779.741.696	4.552.514.036	95,25

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	3.073.677.300	3.073.677.300	100
III.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	454.892.080	341.616.700	75,10
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.545.000	17.595.500	71,69
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	248.668.200	195.290.000	78,53
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	181.678.880	128.731.200	70,86

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 42 (empat puluh dua) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (PTT) 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang

Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Golongan/Kepangkatan				Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol	Go I	Go I	Go I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
IV	III	II	I									

6	13	21	2	42	2	14	3	-	23	-	2	42
---	----	----	---	----	---	----	---	---	----	---	---	----

Tabel 4.5 Jumlah PTT / Pendidikan Tahun 2021 Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pendidikan						Jlh
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
14	4	-	154	1	-	173

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut
 - Dalam penerapan SPM pada tahun anggaran 2021, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
 - Kurangnya sarana penunjang seperti kendaraan operasional dan kendaraan-kendaraan serta peralatan/perlengkapan pendukung lainnya.

Solusi :

 - Peningkatan sarana dan prasarana, mengecek aset yang ada serta mendata segala kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan ketentraman dan ketertiban.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021* merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*. LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*, penyelenggaraan urusan serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program dan kegiatan serta evaluasi kinerja yang tergambar melalui masalah-masalah yang dihadapi serta solusinya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan, *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran* mewujudkannya melalui program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 melalui DPA SKPD *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*. Tahun 2021 *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran* memperoleh alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp. 9.248.656.329,- dan direalisasikan sebesar Rp. 8.570.675.130,- atau 92,67 %, sementara sebesar Rp. 677.981.199,- atau 7,33 % dari dana yang disediakan tidak direalisasikan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pelaihari, 26 Januari 2021

MUH. KUSRI, SP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 196920315 199803 1 012

"I:\LPPD 2020 FIX\BAB I.docx"

"I:\LPPD 2020 FIX\BAB II.docx"

"I:\LPPD 2020 FIX\BAB III.docx"

"I:\LPPD 2020 FIX\BAB IV.docx"

"I:\LPPD 2020 FIX\BAB v.docx"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LPPD - SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan LPPD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini didasari Surat dari Bupati Tanah Laut, tanggal 11 Januari 2021, Nomor : 130 / 64 / Pem/2021, perihal Permintaan Dokumen LPPD dan lampiran Data pendukung IKK LPPD serta laporan Penerapan SPM Tahun 2021, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021.

LPPD SKPD merupakan Laporan Akhir Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021. Laporan ini juga sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD.

Akhirnya semoga LPPD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan diharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan dan peningkatan kinerja yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LPPD SKPD ini.